

**Analisis Realiasi Penerimaan Program Bantuan Pemerintah terhadap  
Kemiskinan di Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul**

**Gia Cinta Saria<sup>1</sup>, Vailimlim Simamora<sup>2</sup>, Jacob Kuntuy<sup>3</sup>, Putri Kemala Dewi<sup>4</sup>**

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara 20221, Indonesia  
gcinta286@gmail.com, vailimsimamora@gmail.com, jackobkuntuy@gmail.com

**ABSTRACT**

*Lumban Tobing Village, Doloksanggul District is located in North Sumatra Province which is the capital of Humbang Hasundutan Regency in Indonesia. The variations quality of life conditions in Lumbang Tobing Village causes variations in poverty conditions in this area. This research aims to determine the condition of poverty in Lumban Tobing Village and formulate a comprehensive poverty program hatching program in Lumban Tobing Village. The method used in this research is descriptive research using a qualitative approach. By using as many as 19 family cards, subjects or as many as 254 families receiving aid were recorded. Research conditions show that poverty conditions in Lumban Tobing Village vary due to different livelihoods, age levels of household heads and limited human resources. The method of poverty in question is the provision of subsidy program assistance in the form of BLT, BST, BPNT, PHK and basic food supplies.*

**Keywords:** *Government Programs; Poverty; Eligibility of Aid Recipients*

**ABSTRAK**

Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul terletak di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Humbang Hasundutan di Indonesia. Kondisi kualitas hidup yang bervariasi di Desa Lumbang Tobing menyebabkan variasi kondisi kemiskinan di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Desa Lumban Tobing dan merumuskan program penetasan program kemiskinan yang komprehensif di Desa Lumban Tobing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan subjek sebanyak 19 kartu keluarga (KK) atau sebanyak keluarga penerima bantuan yang terdata dari 254 keluarga. Kondisi penelitian menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Desa Lumban Tobing bervariasi disebabkan oleh mata pencaharian yang berbeda-beda, tingkatan usia kepala rumah tangga dan keterbatasan sumber daya manusia. Cara kemiskinan yang dimaksud adalah pemberian program bantuan subsidi berupa BLT, BST, BPNT, PHK dan Sembako.

**Kata kunci:** *Program Bantuan Pemerintah; Kemiskinan; Kelayakan Penerima Bantuan*

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup meliputi kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan dan

kebutuhan dasar lainnya. Kemiskinan dapat diakibatkan oleh kurangnya sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau karena sulitnya mengakses pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan sendiri merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak masa penjajahan bahkan hingga saat ini. Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan dan memerlukan upaya yang sangat terpadu untuk mengatasinya. Saat ini pemerintah kita belum menemukan formula pengentasan kemiskinan yang dianggap efektif dan sempurna untuk mengatasi penyebab kemiskinan, sehingga harus terus dikembangkan.

Pada September 2022, garis kemiskinan masyarakat Indonesia sebesar Rp. 535.000 per kapita/bulannya. Sedangkan dibandingkan September 2021, terjadi peningkatan sebesar 10,16%. Menurut BPS, peningkatan kemiskinan tersebut disebabkan oleh efek domino dari kenaikan harga BBM, tingginya PHK, dan tingginya harga komoditas saat itu. BPS bahkan mengklaim kenaikan garis kemiskinan pada September 2022 akan menjadi yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Naik turunnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh sumber pendapatan utama masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi tingkat pendapatan. Sumber pendapatan masyarakat desa umumnya adalah pertanian dan berwiraswasta. Pendapatan masyarakat dari sektor pertanian nampaknya tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga komoditas di pedesaan, serta kenaikan harga komoditas. Begitu juga masyarakat yang berpenghasilan dari wiraswasta, dimana pendapatan yang tidak menentu dan tidak dapat ditafsirkan setiap bulannya. Jika harga komoditas meningkat maka akan menurunkan kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang/jasa dengan tingkat yang tetap.

Wilayah Doloksanggul khususnya desa Lumban Tobing merupakan daerah yang kegiatan umum ekonomi masyarakatnya adalah bertani dan wiraswasta. Kenaikan harga menjadi salah satu penyebab angka kemiskinan di Doloksanggul meningkat, Karena jika harga komoditas hasil tani naik tanpa diiringi kenaikan pendapatan masyarakat itu sendiri, maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya baik berupa makanan, maupun non makanan, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti gizi buruk (Renstra distan 2016-2021 Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan : hal 18-21).

Atas dasar permasalahan kemiskinan tersebut, pemerintah pusat dan daerah Doloksanggul berupaya menghilangkan kelaparan dan mengurangi kemiskinan melalui beberapa program, di antaranya penerimaan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), penerimaan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), penerimaan BST (Bantuan Sosial Tunai), penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan), penerimaan sembako. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan pendanaan untuk melaksanakan program percepatan pengentasan kemiskinan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pendanaan lainnya. Bantuan pemerintah apa pun dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial, khususnya kemiskinan, dan dengan bantuan tersebut maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan terus meningkat

dan meningkat, dengan kata lain tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dijamin oleh pemerintah, karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang mengenai kesejahteraan masyarakat yang ditangani oleh negara.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **1. Kemiskinan**

Supriatna, (1997:90) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi serba terbatas, yang terjadi dan tidak sesuai dengan keinginan orang yang bersangkutan. penduduk yang dikatakan miskin apabila ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas tenaga kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan hidup, yang mempunyai lingkaran disabilitas Kemiskinan dapat disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia, baik melalui pendidikan formal maupun informal, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan informal. Kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan, yang diukur dengan pengeluaran. Masyarakat tergolong miskin jika pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan (BPS:2023)

(Dalam Supriatna. 1997, Pemberdayaan Birokrasi dan Penanggulangan Kemiskinan: hal. 82), mengemukakan lima ciri masyarakat miskin. Kelima ciri penduduk miskin tersebut adalah:

- 1) Tidak mempunyai faktor produksi sendiri,
- 2) Ketidakmampuan menciptakan aset produktif sendiri,
- 3) Umumnya tingkat pendidikan rendah,
- 4) Banyak diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas,
- 5) Di antara mereka yang berusia cukup muda dan tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai.

### **2. Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan**

Kemiskinan tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya di Indonesia karena kemiskinan dapat dinyatakan secara absolut maupun relatif. Hal ini relatif mudah dipahami karena dalam suatu masyarakat selalu terdapat kelompok kaya dan kelompok miskin. Sama sekali tidak diperlukan dalam masyarakat dimana sekelompok orang dianggap miskin. Memang kedua masalah kemiskinan tersebut semanya adalah penting. Sedapat mungkin tidak ada kemiskinan relatif, sehingga dalam suatu masyarakat terdapat sesuatu yang disebut adil atau setara. Kemiskinan absolut pertama-tama harus diatasi atau dihilangkan, karena kemiskinan pada dasarnya mengandaikan adanya kehidupan yang layak, setidaknya masyarakat harus hidup berkecukupan, namun kenyataannya banyak masyarakat yang hidup di bawah garis subsisten, yang dalam hal ini kita sebut garis kemiskinan. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan yang sangat mengancam kemampuan hidup merupakan kemiskinan yang mutlak dan tidak terhindarkan yang perlu segera diatasi dan harus

diatasi dengan melihat pembangunan ekonominya terlebih dahulu. (Suparmoko, 2001).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian upaya suatu perekonomian untuk memperluas kegiatan ekonomi dengan mencakup lebih banyak infrastruktur, peningkatan jumlah usaha dan perluasan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan teknologi. Dengan adanya pembangunan diharapkan kesempatan kerja semakin meningkat, tingkat pendapatan meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sedangkan ekonomi pembangunan merupakan bidang studi ilmu ekonomi yang mempelajari permasalahan perekonomian di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mencapai pembangunan ekonomi (Sadono Sukirno, 2006. *Pembangunan Ekonomi: Proses, Permasalahan dan landasan Kebijakan*. (3)).

### 3. Program Bantuan Pemerintah

Melihat dari banyaknya kasus kemiskinan yang ada, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tujuannya untuk mengurangi kemiskinan diantaranya; penerimaan penerimaan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), penerimaan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), penerimaan BST (Bantuan Sosial Tunai), penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan), penerimaan Sembako. Program-program bantuan sosial ini umumnya diterapkan oleh pemerintah atau organisasi nirlaba dengan tujuan membantu keluarga yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberi dukungan warga yang membutuhkan, terutama dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Maka Bantuan tersebut adalah:

#### a) BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin atau rentan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk kupon atau kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan dan bahan pangan lainnya dari pedagang-pedagang yang tergabung dalam program ini.

#### b) Penerimaan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro)

BPUM adalah singkatan dari Bantuan Produktif Usaha Mikro, yaitu salah satu jenis BLT yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku UMKM. Dalam masa pandemi seperti ini, Pemerintah berharap masyarakat tetap mampu menjalankan bisnisnya dengan baik dan memiliki modal untuk melakukan promosi.

#### c) Penerimaan BST (Bantuan Sosial Tunai)

Bantuan Sosial Tunai adalah program bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada individu atau keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti tingkat pendapatan yang rendah. Tujuannya adalah untuk

membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan biaya pendidikan.

d) Penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan)

Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk uang tunai dan bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima, termasuk akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.

e) Penerimaan sembako

"Sembako" adalah singkatan dari "sembilan bahan pokok" dan Merujuk kepada bahan-bahan makanan pokok yang penting dalam gizi sehari-hari, seperti beras, gula, minyak, tepung terigu, dan lainnya. Penerimaan sembako Merujuk pada pengadaan atau penerimaan bahan makanan pokok ini, baik melalui program bantuan sosial atau pembelian sendiri oleh individu atau keluarga.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bermakna bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan konteks alamiah dengan tujuan untuk mengartikan apa yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, 7). Ruang lingkup penelitian ini adalah agar hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini tidak akan menyimpang dari permasalahan yang ada, oleh karena itu penulis disini mengemukakan beberapa keterbatasan dalam pengolahan dan penyajiannya data. Dimana data yang disajikan adalah data yang diperoleh dari data penerima BPNT, BPUM, BST, PKH, Penerimaan Sembako di Desa Lumban Tobing Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian ke lapangan yang mana bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data dari adanya proses pelaksanaan berbagai program bantuan dari pemerintah bagi masyarakat yang terjadi di Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul. Penelitian digunakan untuk mempertegas laporan yang kami dapatkan dari kepala desa yang menganggap bahwa realisasi pelaksanaan program bantuan pemerintah sudah tepat sasaran. Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Data primer memuat data yang berasal dari sumber pertama penelitian, bersumber dari:

- 1) Purba, Sebagai Kepala Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul
- 2) Yeremia Naibaho, Sebagai Perangkat Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul
- 3) Vailimlim Simamora, Sebagai Warga Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul

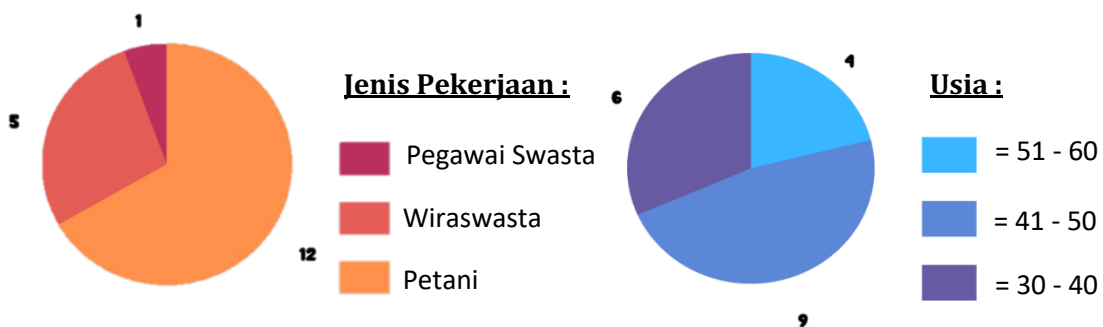
Sedangkan pada data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, data internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara analisis deduktif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori efektivitas sebagai landasan adanya analisis terhadap realisasinya. Dalam hal itu dilakukan dengan cara menganalisis pelaksanaan berbagai bantuan dari pemerintah terhadap kemiskinan di masyarakat Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Diterima dari data yang didapat dari Desa Lumban Tobing, menyatakan bahwa jumlah keseluruhan anggota keluarga yang tercatat sudah ada 254 keluarga, dan dengan laporan bahwa masyarakat miskin di Desa Lumban Tobing, sebanyak 19 keluarga, dengan kesimpulan tingkat kesejahteraan di Desa Lumban Tobing sudah tinggi. Namun, pemerintah terus menggalakkan berbagai cara mengatasi kemiskinan yang sedikit itu, agar pemerataan pendapatan tercapai dengan baik. Maka adapun hal yang berhubungan dengan masalah ini yaitu:

### 1. Faktor Masalah Kemiskinan



Gambar 1. Jenis Pekerjaan

Gambar 2. Usia Penduduk

Sumber: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2023

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz (1997) yaitu: pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal dan beban keluarga. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemiskinan timbul berdasarkan karakteristik demografis berupa jenis pekerjaan, Pendidikan, dan usia. Sementara pada data kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan 2023, jenis pekerjaan terbanyak didominasi dengan petani. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam tanah yang subur yang mendukung jalannya pekerjaan ini, selain itu banyaknya masyarakat yang mengemban pendidikan hanya sampai lulusan SMP / sederajat yang membuat sumber daya manusia di Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul berkualitas rendah. Bahkan dari turun-temurun yang dan hanya berpatok pada satu pekerjaan sebagai petani sudah umum dilakukan. Berdasarkan data rata-rata usia kepala rumah tangga yang ada pada Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul masih tergolong produktif, namun beban yang

ditanggung sudah banyak, dikarenakan faktor kondisi keluarga hingga keterbatasan modal yang dimilikinya.

## 2. Kelayakan Penerima Bantuan

Penerima bantuan harus terdaftar sebagai keluarga yang membutuhkan dukungan di kelurahan setempat. Bukan anggota ASN, TNI atau Polri. Tidak menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan Kartu Prakerja. Data Agregat Jaminan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI. Kriteria usia (lanjut usia) yang termasuk dalam kriteria penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) harus berusia 70 tahun ke atas. Sesuai dengan data Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Masyarakat Miskin dan Penyandang.

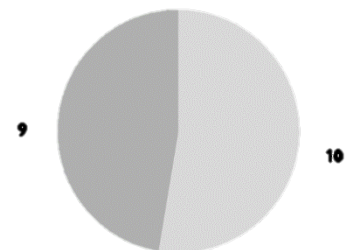
Disabilitas yang meliputi 14 (empat belas) kriteria kemiskinan. Menurut Kementerian Sosial RI, 14 (empat belas) kriteria kemiskinan tersebut antara lain:

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal dengan luas kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang.
- b) Tipe lantai rumah murah dari tanah/bambu/kayu.
- c) Tipe rumah: bambu/domba/dinding kayu berkualitas buruk/dinding tanpa plester
- d) Tidak ada toilet/bersama dengan rumah tangga lain
- e) Sumber penerangan dalam keluarga tidak menggunakan listrik.
- f) Sumber air minum berasal dari sumur/sungai/sungai/air hujan yang tidak terlindung.
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar /minyak tanah.
- h) Hanya makan daging/susu/ayam setiap minggu.
- i) Membeli hanya satu set pakaian baru setiap tahun.
- j) Makannya hanya sekali/dua kali sehari.
- k) Ketidakmampuan membiayai pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l) Sumber pendapatan kepala rumah tangga adalah: Petani dengan luas wilayah 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lain yang berpenghasilan kurang dari Rp 600.000 per bulan.
- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak bersekolah/tidak tamat SD/tidak tamat SD.
- n) Tidak ada harta tabungan/mudah dijual minimal Rp500.000,- seperti sepeda motor kredit/tanpa kredit, emas, ternak, perahu motor atau perlengkapan properti lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Lumban Tobing, terdapat 11 kriteria kelayakan penerima bantuan sosial dari pemerintah. Namun terdapat perbedaan kriteria kelayakan pemerintah Dolok sanggul dengan undang- undang yang ditetapkan.

### KELAYAKAN PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL

- >6
- <6



Gambar 3. Kelayakan Penerimaan Bantuan Sosial

Sumber: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2023

Peneliti merangkum faktor yang menjadi perbedaan kelayakan antara ke 2 kriteria tersebut. Kriteria kelayakan penerima bantuan sosial ini dibedakan berdasarkan, umur, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan rumah, jenis atap, simpanan uang, jenis dinding, jenis lantai, sumber penerangan, bahan bakar memasak, sumber air minum, fasilitas buang air. Di Desa Dolok Sanggul ini umumnya para penerima bantuan dikatakan tidak layak, karena berdasarkan kepemilikan rumah rata-rata penduduk ini memiliki hak atas kepemilikan rumah pribadi, sedangkan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 bahwa memiliki rumah pribadi sudah tidak masuk pada golongan kelompok masyarakat miskin. Lalu pada Pendidikan terakhir penerima bantuan sosial di desa Lumban Tobing rata-rata SMA, sedangkan dalam keputusan kementerian setiap kepala rumah tangga yang pendidikannya sudah sampai di jenjang SMA/ sederajat tidak berhak mendapatkan bantuan. Begitu pun dengan fasilitas buang air yang dimiliki masyarakat tidak termasuk golongan penerima bantuan. Berdasarkan golongan penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial rata-rata masyarakat Desa Lumban Tobing yang menerima bantuan tidak layak. Dari 19 penerima dikatakan hanya 10 keluarga yang dapat dikategorikan layak untuk menerima bantuan. Peneliti menyimpulkan berdasarkan kategori yang ditetapkan kementerian sosial ternyata pemerintah Desa Lumban Tobing memiliki kriteria tersendiri dalam mengategorikan penerima bantuan.

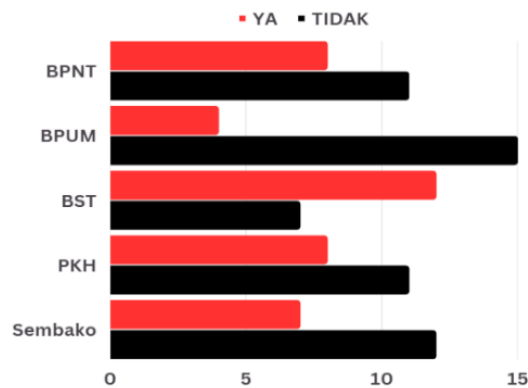
Berdasarkan data tergolong bahwa 11 kriteria penerima bantuan yang ada di Desa Lumban Tobing setiap keluarga memiliki jumlah kelayakan yang berbeda-beda. Jika keluarga penerima bantuan memiliki <6 kriteria kelayakan (pekerjaan, kepemilikan rumah, pendidikan, sumber penerangan, bahan bakar memasak, fasilitas buang air). maka seharusnya tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah, menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013. Sebaliknya jika setiap keluarga memiliki > 6 kriteria kelayakan (umur, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan rumah, jenis atap, simpanan uang, jenis dinding, jenis lantai, sumber penerangan, bahan bakar memasak, sumber air minum, fasilitas buang air) maka dikatakan dapat menerima bantuan dari pemerintah.

### 3. Realisasi Dari Pemerintah

Berdasarkan fenomena yang diamati dan hasil wawancara kepada informan maka faktor yang mendukung proses implementasi kebijakan program ini di Desa Lumban Tobing, Kecamatan Doloksanggul adalah adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan program guna membantu memutus rantai kemiskinan di tingkat masyarakat miskin. Faktor berikutnya adalah adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan program dan adanya jaminan memperoleh bantuan sehari-hari, berupa tunai maupun non-tunai seperti kesehatan hingga pendidikan yang layak dari pemerintah melalui dinas sosial.

Pada hakikatnya program BPNT, BPUM, BST, PKH, PENERIMAAN SEMBAKO di Desa Lumban Tobing Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan ini sudah terjadi dan dirasakan masyarakat. Keberhasilan implementasi program di

desa tersebut pada jangka panjang akan terlihat 10-15 tahun ke depan dimana diharapkan anak-anak dalam keluarga yang mendapatkan bantuan BPNT, BPUM, BST, PKH, PENERIMAAN SEMBAKO akan menjadi anak yang tangguh lebih siap hidup bermasyarakat. Dengan mempersiapkan anak-anak lebih dini tidak menutup kemungkinan dan tidak mustahil pada nantinya anak-anak yang tangguh ini jauh lebih siap menjalankan kehidupan bermasyarakat dan dapat sederajat dengan masyarakat lain pada umumnya.



Gambar 4. Program Bantuan Pemerintah

Sumber: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2023

Disamping itu ternyata setiap penerimaan program bantuan tidak menunjukkan pemerataan. Hal ini bukan berarti Desa Lumban Tobing Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan belum Sejahtera sepenuhnya, melainkan setiap kepala keluarga merasa cukup untuk menerima 1 program saja, padahal sebetulnya mereka masih layak untuk mendapatkan 2-3 bantuan. Tetapi hal ini membuktikan juga bahwa keadilan pada Desa Lumban Tobing Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan sangatlah efisien.

Alasan BPUM kurang dari 5 kepala rumah tangga yang mengambil programnya karena hanya sedikit masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri karena faktor kualitas SDM pun masih rendah, dan kepala rumah tangga usia produktif lebih memilih bantuan yang secara nyata bisa langsung dirasakan untuk kebutuhan keluarganya. Itu alasan Bantuan Sosial Tunai (BST) lebih banyak diambil sebagai bantuan paling efektif.

Lalu pada posisi yang selanjutnya ada Program Keluarga Harapan yang juga menjanjikan keluarga khususnya anak lebih siap dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Mempersiapkan anak sejak dini tidak menutup kemungkinan dan bukan tidak mungkin, bahwa di masa depan anak-anak yang tangguh ini jauh lebih siap hidup bermasyarakat dan mampu setara dengan orang lain pada umumnya. PKH ini sangat berfokus pada Kesehatan dan Pendidikan pada masyarakat.

Dari setiap Program bantuan penanggulangan kemiskinan di Indonesia sudah dilaksanakan pemerintah semenjak orde lama tepatnya sejak tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan

Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Berdasarkan TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang dengan garis besar rencana pembangunan nasional universal periode tahun 1961-1969, model pembangunan pada saat itu lebih mengutamakan tercapainya pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan pada masa itu berfokus pada peningkatan pendapatan nasional, membentuk kesejahteraan rakyat Indonesia (Biro Perancangan Negara, 1956).

Kemakmuran di wujudkan melalui berbagai kebijakan yang akan meningkatkan pendapatan secara mandiri. Bidang pendidikan, perumahan, dan kesehatan, merupakan bidang yang menjadi perhatian penting dari pemerintah. Kemudian dilanjutkan kebijakan untuk peningkatan pendapatan nasional dan keluarga. Program komprehensif peningkatan kualitas penduduk dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Nasional Delapan Tahun (Penasbede, tahun 1961- 1969).

Maka kebijakan dari setiap penanggulangan yang berlangsung pada Desa ini sangat membantu masyarakat agar dapat merasakan kesejahteraan hidup.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penghapusan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pada Desa Lumban Tobing Kecamatan Doloksanggul sudah berjalan dengan efisien, yang artinya program otonomi daerah sudah terlaksana dengan baik. Masyarakat miskin diberi banyak jenis bantuan, baik tunai maupun non-tunai, agar masyarakat di desa itu bisa hidup sejahtera dan tidak mengalami masalah stunting nantinya. Pemberlakuan program ini akan terus dilakukan hingga taraf hidup masyarakatnya sudah terpenuhi dan mulai membaik, dengan harapan bahwa semakin lama program ini terlaksana, perekonomian masyarakat miskin Desa Lumban Tobing, semakin terpenuhi, dan berkurang jumlah penduduk miskinnya.

Dengan terlaksananya otonomi daerah Doloksanggul, terdapat dampak negatif yang akan bermunculan, dimana pemerintah yang membuat 6 program bantuan tunai dan non-tunai seperti, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), Sembako. Maka akan berdampak negatif seperti, pada tingkat kemalasan pada masyarakatnya, mereka akan memiliki sifat yang hanya menunggu bantuan pemerintah, terutama dilihat dari banyaknya bantuan, bahkan dalam 1 keluarga mendapat 6 jenis bantuan. Ketimpangan pada pemberian bantuan juga dapat membuat perselisihan antar masyarakat, yang merasa tidak adil atas ketidakmerataan bantuan yang diberikan.

Dengan masalah yang muncul akibat ketimpangan pemberian bantuan, maka seharusnya pemerintah terlebih dahulu membuat sensus terhadap masyarakat miskin, yang layak mendapat bantuan, agar setiap program yang diberlakukan dapat tepat sasaran, dan tidak ada oknum yang merasa dirugikan. Pemberian bantuan juga seharusnya jangan berlebihan, dalam artian dengan adanya 6 program bantuan,

jangan ada yang 1 rumah tangga mendapat semuanya, karena jika tidak dibatasi maka tingkat kemalasan mencari pekerjaan, yang membuat tingkat pengangguran bertambah. Untuk kebijakan dari setiap penanggulangan yang berlangsung pada Desa ini sangat membantu masyarakat agar dapat merasakan kesejahteraan hidup. Diharapkan ke depannya agar tingkat kemiskinan di Desa Lumban Tobing semakin menurun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anisa Hasmawati. 2023. Meningkatnya Angka Kemiskinan di Indonesia: *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang* (1), 2
- Celeste, George, Audie. 2018. Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara: *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (2), 4
- Dwi Nurhayati. 2021. Kriteria Bantuan Sosial, Diakses dari *LMS Spada Indonesia* pada 15 November 2021 pukul 11.49.
- Dwi Sodik, Sukma Krisnhoe. 2022. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (6), 1
- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2023) Data Miskin Ekstrem Desa Lumban Tobing
- Maria, Tsaniyah, Firdausi. 2010. Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: *Jurnal Universitas Diponegoro* (1)
- Max Ki. 2023. Cara Daftar dan Cek Penerima Banso. *Al-Kharaj: Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2), 2-3
- Mulyani, Sri. 2023. Kemiskinan. Diakses dari *Wikipedia.com* pada 8 Agustus 2023 pukul 12.06.
- Rencana Strategis (RENSTRA). 2021. Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan
- Suherlan Mumu. 2020. Papua Ask Me. *Al-Kharaj: Jurnal Kesejahteraan Sosial* (1), 5
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Washington DC: IMF. ISBN 979-533-792-0
- Supriyanto, B. 2017. *Ekonomi Publik Konsep dan Implementasi Kebijakan*. Sumatera Utara: ISBN 978-602-1286-46-3
- Tisniwati, Baiq. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (10), 1

Fallon, A., & Engel, C. (2008). Hypertensive disorders of pregnancy. *The Practising Midwife*, 11(9), 1-27. Diakses 24 Juni 2016 dari <https://www.practisingmidwife.co.uk>

Laws and Regulations

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang  
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013